

Pengaruh Disparitas Pendidikan terhadap Kualitas Pendidikan di Kota Pelajar Yogyakarta: Studi Kasus Sekolah Islam Negeri Kota Sleman dan Gunung Kidul

Muhamad Reza Syahputra¹, Naufal Ahmad Rijalul Alam²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

rezasahputramuhamad@gmail.com¹, naufal.ahmad@umy.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of educational access and school infrastructure on the quality of education, as well as to identify the factors causing educational disparities between Sleman Regency and Gunungkidul Regency. The research method employed a quantitative approach using multiple linear regression analysis through t-tests and F-tests. The results indicate that educational access has a significant effect on the quality of education, with a t-value of 2.855 and a significance value of 0.017 (< 0.05). Conversely, school infrastructure does not have a significant partial effect on the quality of education, with a t-value of -0.007 and a significance value of 0.995 (> 0.05). However, simultaneously, educational access and school infrastructure have a significant effect on the quality of education, with an F-value of 4.544 and a significance value of 0.039 (< 0.05). Educational disparities between Sleman and Gunungkidul are influenced by differences in geographical accessibility, limited transportation facilities, unequal distribution of schools, socioeconomic conditions of the community, and the quality of educational resources. To reduce these disparities, several strategies are required, including improving educational access through the development of schools and transportation facilities, ensuring equitable distribution of schools and educators, improving infrastructure quality, utilizing educational technology, and providing educational assistance for underprivileged communities. The findings of this study emphasize that improving educational access is a key factor in enhancing educational quality and reducing educational disparities between regions.

Keywords : Educational access, school infrastructure, educational quality, educational disparity.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akses pendidikan dan infrastruktur sekolah terhadap kualitas pendidikan serta mengidentifikasi faktor penyebab disparitas pendidikan antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda melalui uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan dengan nilai thitung sebesar 2,855 dan signifikansi 0,017 ($< 0,05$). Sebaliknya, infrastruktur sekolah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas pendidikan dengan nilai thitung sebesar -0,007 dan signifikansi 0,995 ($> 0,05$). Namun, secara simultan akses pendidikan dan infrastruktur sekolah berpengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan dengan nilai Fhitung sebesar 4,544 dan signifikansi 0,039 ($< 0,05$). Disparitas pendidikan antara Sleman dan Gunungkidul dipengaruhi oleh perbedaan akses geografis, keterbatasan sarana transportasi, persebaran sekolah yang tidak merata, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta kualitas sumber daya pendidikan. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, diperlukan strategi berupa peningkatan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah dan transportasi, pemerataan distribusi sekolah dan tenaga pendidik, peningkatan kualitas infrastruktur, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan akses pendidikan menjadi faktor

utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi disparitas pendidikan antarwilayah.

Kata kunci : akses pendidikan, infrastruktur sekolah, kualitas pendidikan, disparitas pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas (Suryadi, 2014). Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga nilai, sikap, serta kemampuan adaptif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global (Tilaar, 2012). Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu menentukan keberlanjutan pembangunan suatu bangsa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu fokus penting dalam agenda pembangunan Indonesia.

Namun, di tengah berbagai upaya pemerintah, Indonesia masih dihadapkan pada masalah serius berupa disparitas pendidikan, yaitu kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan (Badan Pusat Statistik, 2023). Disparitas ini bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh faktor geografis dan sosial ekonomi (World Bank, 2020), serta dipengaruhi pula oleh kebijakan, kondisi budaya, dan tata kelola pendidikan di daerah (OECD, 2019).

Permasalahan paling nyata dari disparitas pendidikan adalah kesenjangan akses pendidikan. Masyarakat perkotaan memiliki kesempatan lebih luas untuk mengakses sekolah dengan fasilitas memadai dan tenaga pendidik berkualitas (Badan Pusat Statistik, 2022). Sebaliknya, masyarakat di pedesaan dan daerah masih menghadapi kendala berupa jarak sekolah yang jauh, keterbatasan sarana prasarana, serta minimnya jumlah guru (Kemendikbudristek, 2021). Selain itu, faktor ekonomi keluarga turut menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut (UNESCO, 2020).

Selain masalah akses, ketimpangan kualitas pendidikan juga menjadi persoalan mendasar. Kualitas pendidikan di wilayah perkotaan cenderung lebih baik karena didukung oleh tenaga pendidik profesional dan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi (OECD, 2019). Akses terhadap sumber belajar digital juga relatif lebih merata di perkotaan (UNESCO, 2021). Sebaliknya, sekolah di daerah tertinggal masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan metode pembelajaran yang konvensional, yang berdampak pada rendahnya capaian kompetensi peserta didik (Mulyasa, 2018).

Disparitas pendidikan juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar. Data Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta (2023) menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses dan kualitas pendidikan. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan tenaga pendidik yang memadai (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga D.I. Yogyakarta, 2022). Sebaliknya, Kabupaten Gunungkidul masih menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur pendidikan (Bappenas, 2020).

Upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan telah diwujudkan melalui berbagai kebijakan seperti Bantuan Operasional Sekolah dan Program Indonesia Pintar (Kemendikbudristek, 2022). Namun, efektivitas kebijakan tersebut belum merata di semua daerah karena masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur dan lemahnya pengawasan pelaksanaan program (World Bank, 2021). Hal ini sejalan dengan pandangan Nugroho (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kapasitas implementasi di tingkat lokal.

Disparitas pendidikan membawa dampak luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan individu sulit bersaing di pasar kerja formal (Todaro & Smith, 2015). Akibatnya, sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor informal dengan pendapatan rendah, yang pada akhirnya memperbesar ketimpangan sosial dan ekonomi (World Bank, 2020). Kondisi ini juga berkontribusi terhadap rendahnya indeks pembangunan manusia di beberapa wilayah (UNDP, 2022).

Oleh karena itu, disparitas pendidikan merupakan permasalahan krusial yang harus ditangani secara serius. Pendidikan yang merata dan berkualitas merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pemerataan pendidikan juga menjadi bagian penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya tujuan keempat tentang pendidikan berkualitas (United Nations, 2015; UNESCO, 2021).

Dengan demikian, penelitian mengenai disparitas pendidikan di Indonesia, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diperlukan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai faktor penyebab dan dampak disparitas pendidikan (Creswell, 2018). Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berkeadilan (Sugiyono, 2019; Bappenas, 2021).

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Disparitas Pendidikan

Disparitas pendidikan adalah kondisi ketimpangan atau kesenjangan yang terjadi dalam sistem pendidikan, baik antarwilayah, antarkelompok sosial, maupun antarindividu, yang mencakup perbedaan dalam akses, kualitas, proses, dan hasil pendidikan. Disparitas ini umumnya terlihat antara wilayah perkotaan dan pedesaan, daerah maju dan tertinggal, serta antara kelompok masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi dan sosial. Menurut World Bank (2020), disparitas pendidikan bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, sosial, budaya, serta kebijakan publik. OECD (2019) juga menegaskan

bahwa ketimpangan pendidikan yang tinggi dapat menghambat mobilitas sosial dan memperlebar kesenjangan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, disparitas pendidikan masih menjadi persoalan serius meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program pemerataan. Perbedaan kondisi geografis, ketersediaan infrastruktur, distribusi tenaga pendidik, serta kemampuan ekonomi masyarakat menyebabkan tidak meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Disparitas pendidikan tidak hanya berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berimplikasi pada ketimpangan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur pendidikan merupakan variabel independen yang menggambarkan tingkat ketersediaan dan kelayakan fasilitas fisik serta pendukung pembelajaran di sekolah. Infrastruktur pendidikan berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran secara optimal, karena ketersediaan fasilitas yang memadai berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan (World Bank, 2018; Todaro & Smith, 2015).

1. Indikator ketersediaan sarana fisik mencerminkan kondisi dasar infrastruktur sekolah, seperti kelayakan gedung sekolah dan kecukupan ruang kelas dalam menampung jumlah siswa. Gedung sekolah yang layak dan ruang kelas yang memadai menjadi prasyarat utama agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan aman dan nyaman, sementara keterbatasan sarana fisik dapat menghambat efektivitas pembelajaran dan menurunkan kualitas pendidikan (Duflo, 2011).
2. Indikator ketersediaan sarana pendukung mencakup keberadaan dan fungsi fasilitas tambahan seperti laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas olahraga dan kesenian. Laboratorium mendukung pembelajaran berbasis praktik, sedangkan perpustakaan berfungsi sebagai sumber belajar utama bagi siswa, sementara fasilitas olahraga dan kesenian berperan dalam pengembangan karakter, minat, dan bakat peserta didik secara holistik (UNESCO, 2015).
3. Indikator ketersediaan teknologi pendidikan menggambarkan sejauh mana sekolah memiliki akses terhadap teknologi informasi, seperti internet dan perangkat komputer, untuk mendukung pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi semakin penting di era digital karena mampu meningkatkan interaktivitas, inovasi, serta relevansi pembelajaran dengan perkembangan zaman (OECD, 2016).
4. Indikator pemerataan fasilitas antarwilayah menunjukkan tingkat kesetaraan infrastruktur pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pemerataan fasilitas mencerminkan keadilan dalam distribusi sarana pendidikan serta komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan

pendidikan yang setara, karena ketimpangan fasilitas antarwilayah dapat menjadi sumber utama terjadinya kesenjangan pendidikan (World Bank, 2018).

Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan merupakan variabel independen yang menggambarkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh, mulai dari kualitas tenaga pendidik, proses pembelajaran, hingga hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Kualitas pendidikan menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pendidikan dan daya saing sumber daya manusia (Hanushek & Woessmann, 2012).

1. Indikator kualitas tenaga pendidik mencerminkan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidang ajar serta keikutsertaan guru dalam pelatihan berkelanjutan menunjukkan tingkat profesionalisme pendidik, karena guru yang kompeten memiliki peran sentral dalam meningkatkan mutu pembelajaran (Darling-Hammond, 2017).
2. Indikator kualitas proses pembelajaran menggambarkan bagaimana kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas, termasuk penggunaan metode pembelajaran yang inovatif dan beragam. Pembelajaran yang interaktif dan berpusat pada siswa terbukti mampu meningkatkan keterlibatan serta pemahaman siswa terhadap materi pelajaran (Joyce, Weil, & Calhoun, 2016).
3. Indikator kualitas hasil belajar mencerminkan capaian akademik serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Hasil belajar yang optimal menunjukkan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif dan sistem pendidikan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal (Bloom, 2014).
4. Indikator akses terhadap kualitas pendidikan menekankan prinsip keadilan dalam memperoleh pendidikan bermutu. Setiap siswa diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa dipengaruhi oleh perbedaan lokasi geografis sekolah, sehingga sistem pendidikan dapat bersifat inklusif dan berkeadilan (Sen, 2011).

Kesenjangan Pendidikan

Kesenjangan pendidikan merupakan variabel dependen yang menggambarkan tingkat ketimpangan dalam sistem pendidikan, baik dari segi infrastruktur, kualitas, maupun dampak yang ditimbulkan. Kesenjangan ini menunjukkan adanya perbedaan kesempatan dan hasil pendidikan antarwilayah (BPS, 2022).

1. Indikator kesenjangan infrastruktur menunjukkan perbedaan kelengkapan fasilitas pendidikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di wilayah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih

lengkap dibandingkan sekolah di pedesaan, sehingga menciptakan ketimpangan dalam lingkungan belajar (Kemendikbud RI, 2021).

2. Indikator kesenjangan kualitas menggambarkan perbedaan mutu pendidikan antarwilayah yang tercermin dari kualitas pembelajaran, akses terhadap pendidikan bermutu, serta kemudahan memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan (OECD, 2012).
3. Indikator dampak kesenjangan pendidikan menilai konsekuensi ketimpangan terhadap siswa, seperti perbedaan motivasi belajar dan peluang masa depan. Kesenjangan pendidikan berdampak jangka panjang terhadap kesempatan kerja dan mobilitas sosial, sehingga berkaitan erat dengan ketimpangan sosial dan ekonomi (Psacharopoulos & Patrinos, 2018).

Akses Lokasi

Jarak dan Waktu Tempuh ke Sekolah

Indikator ini mengukur rata-rata jarak (km) dan waktu tempuh (menit/jam) yang diperlukan siswa dari rumah menuju sekolah. Jarak yang terlalu jauh dan waktu tempuh yang lama dapat menyebabkan kelelahan, keterlambatan, bahkan putus sekolah, terutama di daerah terpencil. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan akses pendidikan antarwilayah (Badan Pusat Statistik, 2023).

Ketersediaan Transportasi

Indikator ini menilai apakah siswa memiliki akses terhadap sarana transportasi yang memadai, seperti angkutan umum, kendaraan pribadi, atau fasilitas transportasi sekolah. Di banyak daerah, keterbatasan transportasi membuat siswa harus berjalan kaki dalam jarak jauh, sehingga menurunkan minat dan partisipasi sekolah. Hal ini memperbesar kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal (Kemendikbudristek, 2022).

Persebaran dan Kepadatan Sekolah

Indikator ini melihat jumlah dan distribusi sekolah dalam suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah. Daerah dengan jumlah sekolah yang sedikit atau tidak merata akan memaksa siswa menempuh jarak lebih jauh untuk bersekolah. Ketimpangan ini umumnya terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta menjadi penyebab utama disparitas pendidikan (World Bank, 2020).

Kondisi Infrastruktur Jalan dan Aksesibilitas

Indikator ini mengkaji kualitas infrastruktur jalan menuju sekolah, seperti kondisi jalan (baik, rusak, atau tidak layak), serta kemudahan akses selama perjalanan. Jalan yang rusak, berlumpur, atau sulit dilalui saat musim hujan dapat menghambat mobilitas siswa dan guru. Infrastruktur yang buruk secara langsung mempengaruhi tingkat kehadiran dan kualitas pembelajaran (OECD, 2019).

Hambatan Geografis Wilayah

Indikator ini berfokus pada kondisi geografis yang menjadi penghalang alami, seperti pegunungan, sungai, hutan, atau wilayah kepulauan. Siswa yang tinggal di daerah dengan hambatan geografis tinggi sering menghadapi risiko keselamatan dan kesulitan akses yang lebih besar. Hal ini menyebabkan ketimpangan signifikan dalam memperoleh layanan pendidikan dibandingkan dengan wilayah yang lebih mudah dijangkau (UNESCO, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel infrastruktur pendidikan dan kualitas pendidikan terhadap kesenjangan pendidikan. Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi infrastruktur, kualitas pendidikan, dan tingkat kesenjangan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh antarvariabel penelitian (Sugiyono, 2019).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan objek penelitian berupa satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya perbedaan karakteristik wilayah antara daerah perkotaan dan pedesaan yang berpotensi menimbulkan kesenjangan pendidikan. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling, dengan strata wilayah kabupaten/kota di DIY, sehingga setiap wilayah memiliki peluang yang sama untuk terwakili dalam sampel penelitian. Jumlah sampel disesuaikan dengan kebutuhan analisis dan keterbatasan penelitian (Sugiyono, 2019).

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Variabel independen, yaitu: Infrastruktur Pendidikan (X_1) dan Akses Lokasi (X_2). Sementara itu Variabel dependen, yaitu: Kualitas Pendidikan (Y)

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator dan pernyataan pada masing-masing variabel

penelitian. Kuesioner disebarikan kepada responden yang terlibat langsung dalam proses pendidikan, seperti guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi untuk memperoleh data pendukung dari laporan resmi pemerintah dan instansi terkait.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah analisis deskriptif, yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta memberikan gambaran umum mengenai kondisi infrastruktur pendidikan, kualitas pendidikan, dan kesenjangan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden berdasarkan nilai rata-rata, persentase, dan distribusi data pada masing-masing variabel penelitian.

Tahap selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Instrumen penelitian dinyatakan layak digunakan apabila memenuhi kriteria valid dan reliabel sesuai dengan ketentuan statistik yang berlaku.

Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel, data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel infrastruktur pendidikan dan kualitas pendidikan sebagai variabel independen terhadap kesenjangan pendidikan sebagai variabel dependen. Melalui analisis regresi, dapat diketahui arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tahap terakhir adalah uji hipotesis, yang dilakukan melalui uji t dan uji F. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi tertentu guna menentukan apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Akses Pendidikan terhadap Kualitas Pendidikan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan hasil uji t, variabel akses pendidikan (akses lokasi) memiliki nilai t hitung = 2,855 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,017 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemudahan akses seperti jarak sekolah yang dekat, waktu tempuh yang singkat, serta tersedianya sarana transportasi

sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul, keterbatasan akses menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan.

Pengaruh Infrastruktur Sekolah terhadap Kualitas Pendidikan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel infrastruktur sekolah memiliki nilai $t_{hitung} = -0,007$ dengan tingkat signifikansi 0,995 ($> 0,05$). Artinya, infrastruktur sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan secara parsial.

Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun infrastruktur penting, namun dalam konteks penelitian ini tidak menjadi faktor utama yang menentukan kualitas pendidikan. Kemungkinan penyebabnya adalah kondisi infrastruktur yang relatif tidak jauh berbeda antar wilayah atau adanya faktor lain yang lebih dominan seperti akses, kualitas tenaga pendidik, dan kondisi sosial ekonomi.

Pengaruh Infrastruktur Sekolah dan Akses Pendidikan terhadap Kualitas Pendidikan

Berdasarkan uji F diperoleh nilai $F_{hitung} = 4,544$ dengan signifikansi 0,039 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel infrastruktur sekolah dan akses pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan. Pembahasannya, meskipun secara individu infrastruktur tidak berpengaruh signifikan, tetapi jika dikombinasikan dengan akses pendidikan, keduanya memberikan dampak yang berarti terhadap kualitas pendidikan. Artinya, kualitas pendidikan akan lebih optimal jika didukung oleh akses yang baik serta infrastruktur yang memadai secara bersamaan.

Faktor Penyebab Disparitas Pendidikan antara Sleman dan Gunungkidul

Berdasarkan hasil analisis dan didukung oleh kondisi lapangan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan disparitas pendidikan, yaitu:

Perbedaan Akses Geografis

Kabupaten Gunungkidul memiliki kondisi geografis yang didominasi oleh perbukitan, kawasan karst, serta wilayah yang tersebar dan berjauhan antar permukiman. Kondisi ini menyebabkan akses menuju sekolah menjadi lebih sulit, terutama bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil. Sementara itu, Kabupaten Sleman memiliki wilayah yang lebih datar, dekat dengan pusat kota, serta didukung oleh infrastruktur yang lebih baik. Perbedaan kondisi geografis ini menyebabkan siswa di Gunungkidul harus menempuh jarak lebih jauh dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan kualitas pendidikan.

Keterbatasan Sarana Transportasi

Di wilayah Gunungkidul, terutama daerah pedesaan, ketersediaan transportasi umum masih sangat terbatas. Banyak siswa yang harus berjalan kaki atau menggunakan kendaraan sederhana untuk menuju sekolah, bahkan dengan waktu tempuh yang cukup lama. Kondisi ini berbeda dengan Sleman yang memiliki akses transportasi lebih lengkap dan mudah dijangkau. Keterbatasan transportasi ini dapat menyebabkan keterlambatan, kelelahan, hingga menurunnya motivasi belajar siswa, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan.

Persebaran Sekolah yang Tidak Merata

Persebaran sekolah di Sleman cenderung lebih merata dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan Gunungkidul. Di Gunungkidul, beberapa wilayah masih kekurangan fasilitas pendidikan, terutama untuk jenjang pendidikan menengah. Hal ini mengakibatkan siswa harus bersekolah di luar daerahnya atau bahkan tidak melanjutkan pendidikan karena jarak yang terlalu jauh. Ketimpangan persebaran sekolah ini menjadi salah satu faktor utama terjadinya disparitas pendidikan antar wilayah.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbeda

Masyarakat di Sleman umumnya memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat di Gunungkidul. Kondisi ekonomi yang lebih tinggi memungkinkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, seperti kemampuan membayar transportasi, membeli perlengkapan sekolah, hingga mengikuti pendidikan tambahan. Sebaliknya, di Gunungkidul masih banyak masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga pendidikan belum menjadi prioritas utama. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi dan kualitas pendidikan.

Kualitas Sumber Daya Pendidikan (Guru dan Fasilitas Pendukung)

Sleman memiliki keunggulan dalam hal kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan karena lokasinya yang dekat dengan pusat pendidikan dan perkotaan. Banyak guru berkualitas yang lebih memilih mengajar di wilayah dengan akses yang mudah dan fasilitas yang lengkap. Sebaliknya, Gunungkidul masih menghadapi keterbatasan dalam jumlah dan kualitas guru, serta fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan proses pembelajaran kurang optimal dan berdampak pada kualitas pendidikan yang lebih rendah.

Strategi Mengurangi Disparitas Pendidikan di Sleman dan Gunungkidul

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah:

Meningkatkan Akses Pendidikan (Pembangunan Sekolah & Transportasi)

Strategi ini sejalan dengan teori pemerataan akses pendidikan (educational equity) yang menekankan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa terhambat oleh faktor geografis. Menurut pendekatan ini, pembangunan sekolah di daerah terpencil serta penyediaan transportasi sekolah dapat mengurangi hambatan fisik (physical barriers) dalam pendidikan. Selain itu, dalam perspektif teori human capital (Gary Becker), peningkatan akses pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya berdampak pada pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Pemerataan Distribusi Sekolah dan Tenaga Pendidik

Strategi ini berkaitan dengan teori keadilan distributif (distributive justice) yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya secara adil. Dalam konteks pendidikan, pemerataan sekolah dan tenaga pendidik bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Menurut John Rawls dalam teori keadilan, kebijakan harus berpihak pada kelompok yang paling kurang beruntung (the least advantaged). Oleh karena itu, penempatan guru berkualitas di daerah terpencil menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Secara Bertahap

Strategi ini didukung oleh teori input-output dalam pendidikan, yang menyatakan bahwa kualitas output pendidikan (hasil belajar) dipengaruhi oleh kualitas input, seperti sarana dan prasarana. Infrastruktur yang baik, seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, dan fasilitas belajar, akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, dalam perspektif teori sistem pendidikan, infrastruktur merupakan bagian penting dari sistem yang saling berkaitan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Pemanfaatan Teknologi Pendidikan (Digital Learning)

Strategi ini sejalan dengan teori pembelajaran konstruktivisme yang menekankan bahwa siswa dapat membangun pengetahuan melalui berbagai sumber, termasuk teknologi digital. Pemanfaatan e-learning, pembelajaran daring, dan platform digital dapat menjangkau daerah yang sulit diakses secara fisik. Selain itu, konsep digital divide (kesenjangan digital) menjelaskan bahwa ketimpangan akses teknologi dapat memperparah disparitas pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi pendidikan dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Mampu

Strategi ini sesuai dengan teori human capital (Gary Becker) yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan akan meningkatkan produktivitas

individu. Bantuan pendidikan seperti beasiswa, subsidi biaya sekolah, dan bantuan perlengkapan belajar dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, khususnya bagi kelompok ekonomi lemah. Selain itu, dalam perspektif teori mobilitas sosial, pendidikan merupakan sarana utama untuk meningkatkan status sosial ekonomi seseorang, sehingga bantuan pendidikan dapat membantu memutus rantai kemiskinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akses pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul, sedangkan infrastruktur sekolah secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Namun, secara simultan akses pendidikan dan infrastruktur sekolah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Disparitas pendidikan antara Sleman dan Gunungkidul disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan kondisi geografis, keterbatasan transportasi, persebaran sekolah yang belum merata, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta perbedaan kualitas sumber daya pendidikan. Oleh karena itu, pemerataan akses pendidikan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah.

Upaya pengurangan disparitas pendidikan perlu dilakukan melalui peningkatan pemerataan akses pendidikan, terutama pada wilayah yang masih mengalami keterbatasan geografis seperti Gunungkidul. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan penyediaan fasilitas transportasi, pemerataan pembangunan sekolah, distribusi tenaga pendidik berkualitas, serta pengembangan infrastruktur dan teknologi pendidikan secara merata. Selain itu, pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu perlu terus diperkuat agar seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi maupun lokasi tempat tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *Pembangunan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) bidang pendidikan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. (2023). *Statistik pendidikan Provinsi D.I. Yogyakarta*. Yogyakarta: BPS DIY.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik pendidikan Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator pendidikan Indonesia*. Jakarta: BPS.

- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta. (2022). *Profil pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Disdikpora DIY.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Rapor pendidikan Indonesia*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Kebijakan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Mulyasa, E. (2018). *Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, dan manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- OECD. (2019). *Education at a glance 2019: OECD indicators*. Paris: OECD Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, A. (2014). *Pendidikan Indonesia menuju 2025*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). New York: Pearson Education.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNDP. (2022). *Human development report 2022*. New York: United Nations Development Programme.
- UNESCO. (2020). *Global education monitoring report*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. Paris: UNESCO.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York: United Nations.
- World Bank. (2020). *World development report: Learning to realize education's promise*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2021). *Education in Indonesia: Challenges and opportunities*. Washington, DC: World Bank.